



**AICONOMIA:**

**Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**

Vol.3, No.2, Desember 2024, pp. 136-151

ISSN: 2985-5780

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v5i1.7530>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

# Dekonstruksi Konsep Kesejahteraan: Analisis Komparatif Paradigma Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam Berbasis Instrumentasi Maqasid Syariah Imam Asy-Syathibi

**Kusnadi<sup>1</sup>, Taufik<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

---

## Article Info

Publish : 30-12-2024

## Keyword

*Societal Welfare;  
Conventional Economics;  
Islamic Economics;  
Maqasid Shariah; Asy-Syathibi; BPS; BKKBN;*

## E-mail:

kusnadioppo82@gmail.com

taufik@iainkerinci.ac.id

## Abstract

The measurement of societal welfare currently faces a conceptual and epistemological crisis driven by the dominance of a conventional economic paradigm that is inherently materialistic, secular, and utilitarian. Conventional quantitative monetary indicators—such as GDP, alongside metrics from BPS and BKKBN—have proven blind to wealth distribution, neglectful of moral degradation, and prone to the *Easterlin Paradox*. This study aims to conduct an epistemological deconstruction of the conventional welfare concept and operationalize Imam Asy-Syathibi's Maqasid Shariah framework to reformulate and re-map conventional material indicators (BPS and BKKBN) into a holistic welfare matrix. Employing a qualitative library research design, this study utilizes a descriptive-comparative and deconstructive approach analyzed through qualitative content analysis. The findings reveal that conventional physical-material indicators should not be discarded entirely; rather, they must be repositioned as instrumental means (*dharuriyah-hajiyah*) under the pillars of protecting life (*Hifẓ an-Nafs*) and wealth (*Hifẓ al-Mal*). Crucially, the validity of these material achievements is strictly governed by a moral filter system grounded in the protection of religion (*Hifẓ ad-Din*), intellect (*Hifẓ al-'Aql*), and lineage (*Hifẓ an-Nasl*). The implications of this study propose a strategic action plan advocating for the adoption of the *Maqasid Shariah Welfare Index* (MSWI) as a complementary national evaluation tool for policy-makers, as well as a comprehensive benchmark for evaluating empowerment outcomes in Islamic social finance institutions (ZISWAF).

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



---

## Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat pada era modern saat ini sedang mengalami krisis konseptual dan epistemologis yang sangat memprihatinkan akibat cengkeraman hegemonik paradigma pertumbuhan ekonomi konvensional yang bercorak materialistik. Pengukuran keberhasilan pembangunan yang terlalu bertumpu pada indikator-indikator moneter kuantitatif, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Nasional Bruto (PNB), dan Pendapatan Per Kapita, secara fundamental terbukti gagal mencerminkan kualitas hidup masyarakat yang sejati karena secara sistematis mengabaikan distorsi distribusi kekayaan, kerusakan ekologis yang parah, keretakan tatanan sosial, serta degradasi nilai-nilai moral dan spiritualitas manusia

(Stiglitz et al., 2010). Laporan ketimpangan dunia (*World Inequality Report*) mencatat secara empiris bahwa akumulasi kekayaan global secara ekstrem terkonsentrasi hanya pada satu persen segmen populasi teratas, sementara sebagian besar masyarakat dunia tetap terjebak dalam jebakan kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial di tengah retorika kenaikan PDB nasional (Chancel et al., 2022). Di samping itu, yang dikenal secara luas sebagai *Easterlin Paradox* secara konsisten mengonfirmasi bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan moneter pasca-terpenuhinya kebutuhan dasar tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kebahagiaan, kesejahteraan psikologis, dan ketenteraman jiwa masyarakat (Easterlin & O'Connor, 2022). Kegagalan metodologis instrumen kuantitatif konvensional ini kian diperparah oleh ketidakmampuan mekanisme pasar bebas dalam mencegah eksploitasi lingkungan hidup secara masif serta krisis sosial-ekonomi yang berulang demi memburu akumulasi kapital belaka (Piketty, 2014). Krisis multidimensi ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan dekonstruksi kritis dan reorientasi mendasar terhadap kerangka konseptual serta instrumen pengukuran kesejahteraan masyarakat yang selama ini terbelenggu oleh reduksionisme materialisme konvensional.

Diskursus mengenai kesejahteraan hingga saat ini, masih terjebak dalam jurang pemisah dan dikotomi yang tajam antara perbaikan indikator fisik konvensional dan kajian normatif ekonomi Islam. Sebagian besar literatur konvensional hanya berfokus pada upaya merevisi, serta menambahkan variabel fisik material, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI), *Physical Quality of Life Index* (PQLI), maupun *Net Economic Welfare* (NEW), namun tetap mempertahankan fondasi utilitarisme yang antroposentris (Arsyad, 2004; 2015). Di sisi lain, literatur ekonomi Islam cenderung didominasi oleh pembahasan filosofis-doktriner yang belum terintegrasi secara operasional dengan instrumen pengukuran riil di lapangan (Chapra et al., 2008). Studi-lain juga memanfaatkan data indikator Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara konsisten mengukur kesejahteraan masyarakat hanya sebatas pada pemenuhan tingkat pendapatan, konsumsi fisik, dan fasilitas perumahan tanpa memperhitungkan dimensi etika keagamaan serta keberkahan (Fauzi et al., 2021; Siregar et al., 2017). Sementara itu, studi ekonomi Islam terkini kerap mengagungkan konsep *falah* dan *maslahah* secara teoretis, namun gagal menyusun kerangka metodologis komparatif yang sanggup mereposisi dan memetakan indikator-indikator material konvensional tersebut secara sistematis ke dalam suatu instrumen evaluasi terpadu (Cendra et al., 2021; Sari et al., 2021; Fauzi et al., 2022). Akibatnya, terjadi kekosongan literatur yang mampu menjembatani perbandingan epistemologis sekaligus melakukan transformasi struktural terhadap instrumen BPS dan BKKBN melalui pendekatan Maqasid Syariah. Oleh karena itu, perlu sebuah studi yang secara kritis membandingkan kedua paradigma tersebut

sekaligus mentransformasikannya dalam satu kerangka analisis komparatif yang utuh.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada tawaran dekonstruksi epistemologis dan pemetaan ulang secara integratif antara indikator materialistis konvensional (BPS dan BKKBN) ke dalam matriks multidimensi Maqasid Syariah Imam Asy-Syathibi. Pendekatan ini tidak secara mentah menolak atau membuang indikator materialis konvensional, melainkan mereposisi dan mendudukkan elemen fisik-materialistis tersebut sebagai sarana (instrumen *dharuriyah-hajiyah*) di bawah pilar pemeliharaan jiwa (*Hifẓ an-Nafs*) dan pemeliharaan harta (*Hifẓ al-Māl*) (Bakri & Umar, 2016; Kurniawan & Hudafi, 2021). Pada saat yang sama, kerangka ini melengkapinya dengan dimensi holistik pemeliharaan agama (*Hifẓ ad-Din*), akal (*Hifẓ al-'Aql*), dan keturunan (*Hifẓ an-Nasl*) yang selama ini terabaikan dalam instrumen konvensional (Asy-Syathibi, 1997). Maqasid Syariah yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syathibi dalam karya monumental *Al-Muwafaqat* menyediakan landasan metodologis yang sangat fleksibel namun kokoh untuk melakukan penilaian kemaslahatan secara berimbang antara *min nahiyyati al-wujud* (membangun keberadaan) dan *min nahiyyati al-'adam* (mencegah kerusakan) (Asy-Syathibi, 1997). Integrasi ini diperkuat oleh studi empiris yang membuktikan bahwa penilaian kesejahteraan berbasis lima pilar *Maqasid Syariah* memiliki tingkat presisi dan kedalaman yang jauh lebih tinggi dalam merepresentasikan hakikat kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan indeks statistik konvensional tunggal (Fauzi et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan merekonstruksi konsep serta instrumen pengukuran kesejahteraan masyarakat melalui analisis mendalam antara paradigma ekonomi konvensional dan ekonomi Islam berbasis pada instrumentasi Maqasid Syariah Imam Asy-Syathibi. Pemahaman mendalam dan sistematis mengenai keterbatasan ontologis dan epistemologis paradigma konvensional yang materialistik, serta keunggulan holistik dari instrumen Maqasid Syariah, menjadi sangat krusial guna menghasilkan sebuah model pengukuran kesejahteraan alternatif yang tidak hanya valid secara akademis, melainkan juga sangat aplikatif bagi perencanaan kebijakan pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian utama, yaitu (1) bagaimana dekonstruksi epistemologis dan filosofis atas konsep kesejahteraan dalam paradigma ekonomi konvensional apabila dibandingkan dengan paradigma ekonomi Islam?. (2) bagaimana operasionalisasi instrumen Maqasid Syariah Imam Asy-Syathibi dalam mereformulasikan, mentransformasikan, dan memetakan ulang indikator kesejahteraan masyarakat konvensional (seperti indikator BPS dan BKKBN) ke dalam matriks kesejahteraan holistik yang berimbang antara dimensi lahiriah dan batiniah, serta duniawi dan ukhrawi?.

## Metode

Desain penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-komparatif dan dekonstruktif. Desain ini dipilih, karena merupakan metode yang paling tepat dan adaptif untuk membedah, menganalisis secara kritis, mengurai struktur pemikiran mendasar (*epistemologi*) dari paradigma konvensional, serta mentransformasikannya ke dalam kerangka paradigma Maqasid Syariah. Batasan desain ini, difokuskan pada penelusuran tekstual dan analisis filosofis terhadap dokumen literatur sekunder dan primer, tanpa melibatkan penelitian lapangan (*field research*), pengambilan sampel manusia, maupun penggunaan instrumen survei empiris.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder berjenis data kualitatif dokumenter. Data primer meliputi karya monumental Imam Asy-Syathibi *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, dokumen indikator resmi BPS dan BKKBN, serta literatur pemikiran ekonomi fundamental. Data sekunder bersumber dari artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional yang relevan dengan Maqasid Syariah dan indikator kesejahteraan. Sumber data ini dipilih untuk menjamin otoritas teoretis, keabsahan epistemologis, dan validitas ilmiah riset. Batasan sumber data, dibatasi hanya pada publikasi ilmiah terverifikasi yang relevan dengan topik, dengan mengeksklusi sumber non-akademis.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dipilih karena sangat efektif untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengelompokkan teks-teks konseptual dari berbagai era dan sumber teoretis secara rinci dan sistematis. Proses pengumpulan data ini, dibatasi pada tahap penyeleksian dokumen (pemeriksaan keaslian dan relevansi), kategorisasi teks berdasarkan indikator material dan spiritual, serta reduksi data atas informasi yang tidak mendukung pemetaan matriks Maqasid Syariah Imam Asy-Syathibi.

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*) dengan menggunakan pendekatan komparatif-dekonstruktif (Krippendorff, 2009). Analisis data ini dipilih, karena sanggup menguliti asumsi-asumsi dasar materialisme dalam paradigma konvensional sekaligus merekonstruksi dan mentransformasikan indikator BPS dan BKKBN ke dalam matriks holistik *Al-Kulliyat al-Khamsah*. Batasan analisis data berada pada lingkup pemetaan konseptual, penarikan inferensi teoretis, dan penyusunan sintesis paradigma baru, tanpa melakukan pemodelan matematis ataupun pengujian kuantitatif.

## Hasil dan Pembahasan

### Dekonstruksi Epistemologis dan Filosofis Konsep Kesejahteraan: Ekonomi Konvensional vs. Ekonomi Islam

Secara ontologis, paradigma ekonomi konvensional membangun gagasan kesejahteraan (*welfare*) di atas fondasi faham sekularisme, materialisme, dan rasionalisme (El-Karanshawy et al., 2015). Dalam tradisi pemikiran Barat, evolusi teori kesejahteraan dipengaruhi secara dominan oleh mazhab Utilitarianisme (Sudarsono, 1982). Utilitarianisme mempostulatkan bahwa tujuan tertinggi dari tindakan manusia dan kebijakan publik adalah memaksimalkan kepuasan atau kegunaan (*utility maximization*) serta meminimalisasi rasa sakit. Kesejahteraan masyarakat diartikan secara agregat sebagai jumlah total dari kepuasan material individual (*the greatest happiness of the greatest number*) (Sudarsono, 1982; Pressman, 2000).

Dalam perkembangannya, *Neoclassical Welfare Economics* merevisi pengukuran utilitas kardinal yang subjektif menjadi preferensi ordinal berbasis rasionalitas konsumen. Puncak dari formulasi ini diwakili oleh prinsip *Pareto Optimality* atau *Pareto Efficiency* yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto. Suatu keadaan alokasi sumber daya dianggap efisien dan menyejahterakan secara maksimum apabila tidak ada lagi perubahan alokasi yang dapat membuat kondisi seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan kondisi sedikitnya satu orang lain menjadi lebih buruk. Secara kritis, dekonstruksi terhadap *Pareto Efficiency* memperlihatkan kecacatan etis yang mendasar. Kriteria Pareto secara implisit mempertahankan status quo distribusi aset dan kekayaan yang ada di masyarakat. Kriteria ini melarang adanya tindakan redistribusi kekayaan secara paksa dari kelompok sangat kaya kepada kelompok miskin apabila redistribusi tersebut mengurangi utilitas nominal orang kaya, meskipun pengurangan tersebut sangat kecil dan mampu menyelamatkan kelangsungan hidup ribuan orang miskin. Akibatnya, kriteria ini steril dari pertimbangan keadilan substantif (*substantive justice*) dan gagal menyelesaikan masalah ketimpangan struktural (Sudarsono, 1982; Baujard, 2016).

Selanjutnya, pendekatan *New Contractarian Approach* menekankan kebebasan individu yang maksimum (*maximum individual freedom*). Namun demikian, kebebasan individu dalam kerangka kapitalisme klasik pada akhirnya bermuara pada doktrin "*you get what you deserved*". Kesejahteraan dianggap sebagai tanggung jawab murni pencapaian individu. Orang kaya dipandang sebagai cerminan dari kerja kerasnya, sedangkan kemiskinan dianggap sebagai kegagalan pribadi, sehingga negara atau kelompok kaya tidak memiliki kewajiban moral-religius untuk membagi hartanya kepada kelompok miskin di luar dorongan sukarela (Sudarsono, 1982).

Secara epistemologis, ekonomi konvensional mengukur kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif moneter pada tingkat makro, seperti Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), Produk Nasional Bruto (PNB/GNP), dan Pendapatan Per Kapita (Arsyad, 2004; 2015). Adam Smith dalam

*The Wealth of Nations* menegaskan bahwa kesejahteraan tercipta apabila produksi barang dan jasa nasional (GNP) mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dengan efisiensi biaya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja (Kucukaksoy, 2011).

Namun, penggunaan PDB dan pendapatan per kapita sebagai instrumen tunggal kesejahteraan mengandung kelumpuhan metodologis yang parah (Stiglitz et al., 2010). *Pertama*, PDB hanya merekam transaksi barang dan jasa yang masuk ke dalam mekanisme pasar formal berskala moneter, serta secara sistematis mengabaikan nilai ekonomi informal, pekerjaan domestik non-berbayar, dan kerja-kerja kebudayaan (Arsyad, 2004; 2015). *Kedua*, PDB bersifat *blind to distribution* (buta terhadap distribusi). Kenaikan PDB per kapita suatu negara dapat terjadi secara masif akibat lonjakan pendapatan 1% populasi teratas, meskipun pendapatan riil 99% populasi sisanya mengalami stagnasi atau kemerosotan (Chancel et al., 2022). *Ketiga*, PDB mencatat eksternalitas negatif (seperti biaya pemulihan kerusakan lingkungan, biaya pengobatan akibat polusi, dan biaya pemulihan bencana) sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi positif, padahal hal tersebut merefleksikan penurunan kualitas hidup masyarakat yang nyata (Arsyad, 2004; 2015).

Upaya penyempurnaan indikator konvensional melahirkan *Net Economic Welfare* (NEW) dari Nordhaus dan Tobin yang memasukkan koreksi waktu senggang (*leisure time*) dan biaya kerusakan lingkungan, *Physical Quality of Life Index* (PQLI), serta *Human Development Index* (HDI/IPM) yang digagas oleh UNDP (Arsyad, 2004; 2015; Maulana & Bowo, 2013). IPM menggabungkan tiga dimensi: angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup layak berbasis daya beli (Bhakti et al., 2014; Setiawan, 2013). Meskipun IPM berhasil menggeser fokus dari sekadar indikator moneter menuju pembangunan manusia, IPM dan indikator konvensional turunan lainnya tetap terbelenggu oleh reduksionisme materialis. Indikator-indikator tersebut menempatkan manusia semata-mata sebagai sumber daya ekonomi (*human capital*) dan pengonsumsi komoditas fisik, serta secara total mengabaikan kebutuhan spiritual, ketenangan jiwa, kesehatan moral, dan keberadaan tatanan etis dalam kehidupannya (Chapra et al., 2008).

Kegagalan epistemologis indikator materialistis konvensional secara nyata ditunjukkan oleh fenomena *Easterlin Paradox*, yang membuktikan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan lonjakan pendapatan riil per kapita di negara-negara maju tidak diikuti oleh peningkatan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis masyarakat secara linier. Setelah kebutuhan material dasar terpenuhi, penambahan kekayaan materiil justru memicu persaingan konsumsi yang kompetitif, kecemasan status, kesepian sosial, dan kemerosotan mental (Easterlin & O'Connor, 2022). Hal ini menguatkan kritik Amartya Sen dalam Pressman (2000), yang menyatakan bahwa kesejahteraan tidak didefinisikan sebagai akumulasi barang dan jasa semata, melainkan pengembangan kapabilitas inheren manusia untuk hidup secara bebas dan bermartabat (Pressman, 2000).

Berbeda secara fundamental dari paradigma konvensional, epistemologi kesejahteraan dalam ekonomi Islam berakar pada doktrin *Tauhid*, yang memandang bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak atas seluruh sumber daya di alam semesta, sementara manusia berkedudukan sebagai khalifah yang disertai amanah untuk mengelola bumi sesuai dengan ketentuan Syariat. Konsekuensi logis dari paradigma *Tauhid* ini adalah bahwa kegiatan ekonomi bukan sekadar sarana pemuasan nafsu materiil individual yang tak terbatas, melainkan bagian integral dari ibadah dan pengabdian transendental kepada Allah SWT.

Dalam kerangka ekonomi Islam, puncak dari kondisi sejahtera tidak direpresentasikan oleh pemaksimalan utilitas materialistis (*hedonisme*), melainkan oleh pencapaian *Falah* dan *Hayatan Thoyyibatan*. *Falah* mencakup kebahagiaan di dunia dan keselamatan abadi di akhirat. *Hayatan Thoyyibatan* merujuk pada tatanan kehidupan yang baik, harmonis, dan seimbang antara dimensi jasmani dan rohani, serta antara pemenuhan kebutuhan individual dan keberlangsungan kolektif (Chapra, 1992). Dalam ekonomi Islam, harta kekayaan (*al-mal*) bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menegakkan ibadah, membangun keadilan sosial, dan mencapai ridha Allah SWT. Pelaksanaan rukun Islam secara jelas mengonfirmasi integrasi ini: ibadah shalat memerlukan pakaian penutup aurat yang bersih, ibadah puasa memerlukan ketersediaan pangan bergizi untuk sahur dan berbuka, serta ibadah zakat dan haji mensyaratkan kepemilikan harta kekayaan yang sah dan mencukupi (Luthfi & Ismail, 2018). Oleh karena itu, kesejahteraan dalam ekonomi Islam bersifat holistik, seimbang, dan berorientasi jangka panjang melampaui batas-batas kehidupan duniawi.

Pencapaian *falah* juga mensyaratkan berjalannya pilar-pilar etis-filosofis Islam, yaitu: *Pertama*, keadilan substantif (*'Adl*). Berbeda dengan prinsip *Pareto Efficiency* yang mempertahankan ketimpangan, keadilan Islam menuntut adanya jaminan persamaan kesempatan dan redistribusi kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin melalui instrumen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) guna mencegah pemusatan harta pada segmen tertentu saja (Khadduri, 1984; Rozalinda, 2017). Doktrin keadilan Islam berlandaskan pilar "*La tadzlimuna wa la tudzlamun*" (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi) (Hamid, 2007). *Kedua*, sosialisme Islam. Islam mengusung persaudaraan universal dan kesetaraan derajat manusia (Tjokroaminoto, 2010). Hubungan antarindividu dalam masyarakat bukan bersifat kompetitif-antagonis sebagaimana dalam pasar bebas, melainkan kooperatif-komplementer (Rahman, 1995). *Ketiga*, kemaslahatan universal (*Maslahah*). Seluruh tata aturan ekonomi ditujukan untuk mendatangkan kemanfaatan universal dan menolak segala bentuk kemudharatan bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Untuk meringkas dekonstruksi mendasar antara kedua paradigma ekonomi ini, Tabel 1 menyajikan pemetaan komparatif secara sistematis berdasarkan dimensi ontologi, epistemologi, rasionalitas, instrumen pengukuran, serta orientasi akhirnya.

Tabel 1: Matriks Perbandingan Epistemologis dan Filosofis Kesejahteraan

| Dimensi Analisis      | Paradigma Ekonomi Konvensional                                                                                    | Paradigma Ekonomi Islam                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Landasan Ontologis    | Sekularisme, materialisme, positivisme, dan antroposentrisme.                                                     | Tauhid, khilafah, dan tazkiyah (Transcendental).                                                                 |
| Hakikat Kesejahteraan | Pemenuhan kepuasan fisik/materiil individual ( <i>hedonisme</i> ) dan akumulasi barang/jasa.                      | Pencapaian <i>Falah</i> dan <i>Hayatan Thoyyiban</i> (kesejahteraan holistik lahir-batin)                        |
| Rasionalitas Tindakan | <i>Self-interest rationality</i> (Pemaksimalan utilitas pribadi tanpa batas moral keagamaan).                     | <i>Islamic rationality</i> (pemaksimalan <i>maslahah</i> yang terikat oleh batasan syariat).                     |
| Prinsip Keadilan      | <i>Pareto Efficiency</i> (Menolak redistribusi yang mengurangi utilitas kelompok kaya); <i>Market mechanism</i> . | Keadilan substantif ( <i>'adl</i> ), progresivitas redistribusi kekayaan (ziswaf), pelarangan riba dan kezaliman |
| Sifat Hubungan Sosial | Kompetitif, individualistik, dan antagonis ( <i>Survival of the fittest</i> ).                                    | Kooperatif-komplementer, persaudaraan, dan jaminan sosial.                                                       |
| Dimensi Waktu         | Jangka Pendek Duniawi                                                                                             | Duniawi dan ukhrawi                                                                                              |
| Instrumen Pengukuran  | PDB/GDP, Pendapatan Per Kapita, IPM/HDI, PQLI (Fokus pada kuantitas fisik-moneter).                               | Matriks <i>Al-Kulliyat al-Khamsah</i> Maqasid Syariah (agama, jiwa, akal, keturunan, harta).                     |

### Reformulasi, Transformasi, dan Pemetaan Ulang Indikator Kesejahteraan Konvensional ke Dalam Matriks Maqasid Syariah Imam Asy-Syathibi

Dalam karya monumental *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Imam Asy-Syathibi menegaskan bahwa penetapan hukum dan aturan Syariat oleh Allah SWT semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya (*maslahat al-'ibad*) di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut direalisasikan melalui perlindungan dan pemeliharaan atas lima unsur pokok kehidupan (*Al-Kulliyat al-Khamsah*), yaitu: pemeliharaan agama (*Hifẓ Din*), pemeliharaan jiwa (*Hifẓ an-Nafs*), pemeliharaan akal (*Hifẓ al-'Aql*), pemeliharaan keturunan (*Hifẓ an-Nasl*), pemeliharaan harta (*Hifẓ al-Mal*) (Asy-Syathibi, 1997).

Untuk menjamin efektivitas pemeliharaan kelima pilar tersebut, Imam Asy-Syathibi membagi tingkat ke dalam tiga hierarki yang bersifat dinamis dan berurutan, yaitu (Asy-Syathibi, 1997):

*Pertama*, tingkat *Dharuriyah* (primer). Kebutuhan mutlak yang wajib ada demi menjaga eksistensi kelima pilar utama. Jika tingkat *dharuriyah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan parah (*fasad*), kekacauan sosial, dan kehancuran moral di dunia serta kerugian di akhirat.

Kedua, tingkat *Hajiyah* (sekunder). Kebutuhan pelengkap yang diperlukan untuk menghilangkan kesempitan (*masyaqqah*), kelangkaan, dan kesulitan dalam mengaktualisasikan tingkat *dharuriyah*. Ketidadaan tingkat *hajiyah* tidak merusak kehidupan secara total, tetapi menyebabkan kesulitan besar dan hambatan dalam mobilitas hidup manusia.

*Ketiga*, tingkat *Tahsiniah* (tersier): Kebutuhan komplementer yang berfungsi untuk menyempurnakan keindahan, etika, kerapian, dan keanggunan hidup. Kebutuhan ini berkaitan dengan pemuliaan moral (*makarim al-akhlak*) dan kenyamanan hidup.

Metodologi pemeliharaan kelima pilar ini oleh Asy-Syathibi dibagi menjadi dua dimensi tindakan, yaitu *pertama*, *Min nahiyati al-wujud* (segi keberadaan). Tindakan progresif untuk membangun, memelihara, dan mengembangkan faktor-faktor yang melanggengkan keberadaan kelima pilar Maqasid (misalnya: bekerja halal untuk *Hifẓ al-Mal*, menuntut ilmu untuk *Hifẓ al-'Aql*, dan berolah raga/makan sehat untuk *Hifẓ an-Nafs*). *Kedua*, *Min nahiyati al-'adam* (segi ketidadaan/pencegahan): Tindakan preventif dan represif untuk mencegah, menolak, dan memusnahkan faktor-faktor yang mengancam atau merusak eksistensi kelima pilar tersebut (misalnya: penegakan sanksi atas pencurian/riba untuk *Hifẓ al-Mal*, pelarangan khamar/narkoba untuk *Hifẓ al-'Aql*, dan pelarangan zina untuk *Hifẓ an-Nas*) (Asy-Syathibi, 1997; Fauzia & Riyadi, 2014).

Di Indonesia, dua lembaga utama yang menjadi rujukan pengukuran kesejahteraan tingkat mikro dan makro adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Indikator BPS mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan lima dimensi utama, yaitu tingkat pendapatan, komposisi pengeluaran (rasio pangan vs non-pangan), pendidikan, kesehatan, dan perumahan (Rizal et al., 2018; Siregar et al., 2017). Sementara itu, BKKBN membagi tingkat kesejahteraan keluarga ke dalam lima tahapan: Keluarga Pra-Sejahtera, Sejahtera I (KS I), Sejahtera II (KS II), Sejahtera III (KS III), dan Sejahtera III Plus (KS III Plus) berbasis 21 indikator sosiologis (Fahrudin, 2014; Faturochman & Dwiyanto, 2016, Puspita, 2014; Sunarti, 2011).

Secara analitis dekonstruktif, indikator BPS dan BKKBN memiliki kelemahan epistemologis yang signifikan, yaitu:

*Pertama*, reduksi sekuler-materialistis. Indikator BPS dan BKKBN menempatkan tingkat pendapatan moneter, konsumsi fisik, dan luas lantai perumahan sebagai penentu utama derajat kesejahteraan. Seseorang atau sebuah keluarga secara otomatis dikategorikan "sejahtera" apabila memiliki pendapatan di

atas Rp 5.000.000,- dan rumah berlantai keramik, tanpa mempedulikan apakah pendapatan tersebut diperoleh dari kegiatan perjudian, penipuan, transaksi riba, atau pekerjaan haram lainnya.

Kedua, kebutaan terhadap kualitas moral dan keberagamaan. Indikator BPS secara total tidak merekam variabel spiritualitas dan etika. Pada indikator BKKBN, dimensi agama dimasukkan secara sangat dangkal (sekadar "beribadah sesuai agamanya" pada KS II dan "meningkatkan pengetahuan agama" pada KS III), namun tidak dijadikan variabel penyaring (*filter variable*) yang membatalkan status kesejahteraan apabila terjadi pelanggaran moral berat.

*Ketiga*, penyatuan kebutuhan tanpa hirarki Maqasid. Indikator BPS dan BKKBN mencampuradukkan antara kebutuhan esensial (*dharuriyah*) dan kebutuhan gaya hidup (*tahsiniah*). Pemilikan barang elektronik atau kendaraan sering kali dijadikan penanda kesejahteraan tanpa menilai ketahanan finansial riil dan tingkat utang rumah tangga.

Meskipun demikian, indikator BPS dan BKKBN tidak harus dibuang secara mutlak. Melalui pendekatan Maqasid Syariah, indikator-indikator material BPS dan BKKBN direposisi dan ditransformasikan. Indikator BPS/BKKBN menduduki pilar *Hifz an-Nafs* (kesehatan dan perumahan) dan *Hifz al-Mal* (pendapatan dan konsumsi) pada tingkat *Dharuriyah* dan *Hajiyah*. Namun, keabsahan indikator material tersebut diikat dan disyaratkan oleh pemenuhan pilar *Hifz ad-Din* (kehalalan dan ibadah), *Hifz al-'Aql* (pendidikan moral-intelektual), dan *Hifz an-Nasl* (keharmonisan keluarga).

Untuk mentransformasikan indikator konvensional BPS dan BKKBN ke dalam matriks Maqasid Syariah yang holistik. Tabel 2 memetakan integrasi indikator fisik-materiil konvensional ke dalam lima pilar *Al-Kulliyat al-Khamsah* yang telah dilengkapi dengan variabel spiritual, etis, dan komplementer Islam.

Tabel 2: Matriks Transformasi Indikator BPS dan BKKBN ke Dalam Maqasid Syariah

| Pilar Maqasid Syariah                     | Indikator Material Konvensional Terintegrasi (BPS & BKKBN)                                                                                              | Indikator Tambahan Kesejahteraan Islam (Spiritual & Etis)                                                                                             | Hierarki Kebutuhan (Dharuriyah, Hajiyah, Tahsiniah)                                                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hifz ad-Din ( <i>Pemeliharaan Agama</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>BKKBN KS II: Anggota keluarga beribadah sesuai agama.</li> <li>BKKBN KS III: Upaya aktif meningkatkan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Istiqamah Shalat Fardhu 5 waktu (jamaah).</li> <li>Pelaksanaan Puasa Ramadhan dan Pembayaran Zakat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dharuriyah: Shalat, Zakat, Puasa, Syahadat.</li> <li>Hajiyah: Pengajian, Shalat Berjamaah.</li> </ul> |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | pengetahuan agama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keikutsertaan dalam majelis ilmu/pengajian.</li> <li>• Niat dan ikhtiar menunaikan ibadah Haji.</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahsiniyah: Ibadah Sunnah, Umrah/Haji plus.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| Hifz an-Nafs<br>(Pemeliharaan Jiva)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPS/BKKBN: Akses sarana kesehatan, imunisasi, pertolongan persalinan.</li> <li>• BPS/BKKBN: Kecukupan makan <math>\geq 2</math> kali sehari, konsumsi gizi protein.</li> <li>• BPS/BKKBN: Perumahan layak (atap, dinding, lantai <math>\geq 8m^2</math>/orang).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaminan Kehalalan dan Thayyib pada makanan (<i>Halalan Thayyiban</i>).</li> <li>• Rutinitas menjaga kebersihan diri dan sanitasi lingkungan.</li> <li>• Terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan rasa takut.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dharuriyah: Makanan pokok halal, rumah berlindung, pengobatan dasar.</li> <li>• Hajiyah: Variasi gizi protein, sanitasi bersih.</li> <li>• Tahsiniyah: Kenyamanan rumah, suplemen kesehatan.</li> </ul>            |
| Hifz al-'Aql<br>(Pemeliharaan Akal)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPS/BKKBN: Angka melek huruf latin (10-60 thn).</li> <li>• BPS/BKKBN: Partisipasi sekolah anak usia 7-15 tahun.</li> <li>• BPS: Pendidikan tertinggi yang ditamatkan.</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan berbasis integrasi ilmu umum dan agama (<i>Islamic character</i>).</li> <li>• Terbebas secara mutlak dari Miras, Narkoba, dan Judi.</li> <li>• Bebas dari paparan pornografi dan informasi destruktif.</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dharuriyah: Melek huruf, baca Al-Qur'an, wajar 9-12 thn, bebas Narkoba.</li> <li>• Hajiyah: Perguruan tinggi, keahlian keterampilan.</li> <li>• Tahsiniyah: Beasiswa prestasi, literasi digital tinggi.</li> </ul> |
| Hifz an-Nasl<br>(Pemeliharaan Keturunan) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BKKBN: Pasangan Usia Subur (PUS)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernikahan yang sah secara Syariat dan Hukum Negara.</li> </ul>                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dharuriyah: Pernikahan sah, perlindungan</li> </ul>                                                                                                                                                                |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>menggunakan alat kontrasepsi (KB).</li> <li>BKKBN KS III: Kebiasaan makan bersama &amp; komunikasi keluarga.</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penanaman Akidah dan Akhlakul Karimah pada anak sejak dini.</li> <li>Keharmonisan (<i>Sakinah, Mawaddah, Warahmah</i>) dan ketiadaan perceraian.</li> <li>Hubungan sosial santun dengan tetangga (<i>Muamalah</i>).</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>fisik anak dari kejahatan.</li> <li>Hajiyah: Komunikasi keluarga, perencanaan keluarga (KB).</li> <li>Tahsiniyah: Rekreasi keluarga islami, sumbangan sosial lingkungan.</li> </ul>                                              |
| Hifz al-Mal ( <i>Pemeliharaan Harta</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>BPS: Tingkat Pendapatan total rumah tangga.</li> <li>BPS: Komposisi pengeluaran (rasio pangan vs non-pangan).</li> <li>BKKBN KS III: Memiliki tabungan (uang/barang).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehalalan Sumber Pendapatan (Bebas Riba, Gharar, Judi, Penipuan).</li> <li>Kebiasaan berinjak dan bersedekah secara teratur.</li> <li>Terbebas dari jerat utang ribawi yang membelenggu (<i>Gharimin</i>).</li> <li>Kepemilikan investasi syariah untuk ketahanan finansial.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dharuriyah: Pendapatan dari kerja halal untuk <i>basic needs</i>, bebas utang haram.</li> <li>Hajiyah: Memiliki tabungan dan dana darurat.</li> <li>Tahsiniyah: Investasi syariah, wakaf produktif, sedekah sukarela.</li> </ul> |

Dari tabel di atas, operasionalisasi terperinci mengenai bagaimana masing-masing pilar Maqasid Syariah mengintegrasikan, mentransformasikan, dan melengkapi indikator kesejahteraan masyarakat.

*Pertama, Hifz ad-Din.* Pilar *Hifz ad-Din* merupakan pilar tertinggi dalam epistemologi Islam yang menentukan keabsahan hakiki dari kesejahteraan. Dalam

indikator BPS, pilar ini sama sekali tidak ada, sedangkan dalam BKKBN hanya muncul sebagai indikator normatif sekunder.

*Kedua, Hifẓ an-Nafs.* Pilar *Hifẓ an-Nafs* berfokus pada jaminan keselamatan fisik, kesehatan jasmani, dan ketenteraman mental manusia. Pilar ini mengasimilasi sebagian besar indikator fisik dari BPS dan BKKBN.

*Ketiga, Hifẓ al-'Aql.* Pilar *Hifẓ al-'Aql* menjamin keterjagaan dan pengembangan potensi daya pikir dan kapasitas intelek manusia. Indikator konvensional BPS/BKKBN mengukurnya dari melek huruf dan partisipasi sekolah formal.

*Keempat, Hifẓ an-Nasl.* Pilar *Hifẓ an-Nasl* bertujuan untuk menjamin kelangsungan jenis manusia secara bermartabat, menjaga kehormatan keluarga, serta mencetak generasi penerus yang berakhlak mulia. Indikator BKKBN menekankan penggunaan alat kontrasepsi (KB) dan kebiasaan makan bersama.

*Kelima, Hifẓ al-Mal.* Pilar *Hifẓ al-Mal* mengatur mengenai cara perolehan, pengelolaan, dan pengembangan harta kekayaan agar mendatangkan keberkahan dan menopang keempat pilar Maqasid lainnya. BPS mengukurnya melalui tingkat pendapatan dan rasio pengeluaran.

## Kesimpulan

Penelitian ini bertitik tolak dari krisis konseptual dan epistemologis dalam pengukuran kesejahteraan masyarakat yang dipicu oleh dominasi paradigma ekonomi konvensional. Pendekatan konvensional terbukti terbelenggu oleh reduksionisme materialis, utilitarianisme sekuler, serta kriteria *Pareto Efficiency* yang secara mutlak mengabaikan dimensi spiritualitas, etika keagamaan, dan keadilan redistributif substantif. Temuan utama penelitian ini menyajikan kebaharuan mendasar yang membedakannya secara tegas dari studi-studi terdahulu. Ketika literatur konvensional sebatas merevisi variabel fisik material (seperti pada HDI, BPS, atau BKKBN) dan literatur ekonomi Islam terdahulu cenderung terjebak pada wacana doktriner-normatif (*falah* dan *maslahah*) tanpa integrasi operasional, penelitian ini menawarkan tawaran metodologis integratif. Indikator materiil konvensional tidak dibuang, melainkan direposisi dan didudukkan sebagai sarana (*dharuriyah-hajiyah*) di bawah pilar pemeliharaan jiwa (*Hifẓ an-Nafs*) dan harta (*Hifẓ al-Mal*). Pada saat yang sama, status kesejahteraan materiil tersebut diikat secara mutlak oleh penyaring moral (*moral filter system*) berbasis pemeliharaan agama (*Hifẓ ad-Din*), akal (*Hifẓ al-'Aql*), dan keturunan (*Hifẓ an-Nasl*).

Implikasi penelitian ini, merumuskan untuk menggeser status quo kebijakan pembangunan. Secara logis, terus-menerus mengandalkan PDB per kapita atau indikator fisik moneter akan menyesatkan arah pembangunan nasional mengategorikan pelaku kejahatan ekonomi atau keluarga berpendapatan tinggi yang hancur secara moral sebagai kelompok "sejahtera". Oleh karena itu, hal-hal yang perlu ditempuh meliputi: *pertama*, Bappenas dan BPS harus mengadopsi Indeks

Kesejahteraan Maqasid Syariah (IKMS) sebagai instrumen evaluasi komplementer nasional. *Kedua*, lembaga pengelola zakat dan wakaf (BAZNAS/LAZ) harus mengubah indikator keberhasilan pemberdayaan *mustahik* dari sekadar kenaikan nominal pendapatan menjadi penilaian lima pilar Maqasid. *Ketiga*, kebijakan jaminan sosial pemerintah wajib mengintegrasikan bantuan materiil dengan pembinaan moral, pendidikan akhlak, dan ketahanan keluarga.

Secara teoritis, penelitian ini berhasil mengunggulkan kerangka *Al-Kulliyat al-Khamsah* Imam Asy-Syathibi atas model-model ekonomi konvensional. Dibandingkan dengan kriteria *Pareto Efficiency* yang mempertahankan ketimpangan struktural atau utilitas kardinal yang terjerat *Easterlin Paradox*, matriks Maqasid Syariah terbukti mampu merekonstruksi pendekatan kapabilitas Amartya Sen ke dalam dimensi transcendental yang utuh. Model ini menyajikan kerangka evaluasi yang tidak hanya menilai apa yang dimiliki masyarakat, melainkan juga apa yang berhasil dicegah dari kemerosotan moral dan kerusakan sosial, demi mengarahkan pembangunan menuju pencapaian *falah* di dunia dan akhirat.

### Daftar Pustaka

- Achmad, R. (2018). Potret Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Pembudidaya Ikan di Ciganjur Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(1).
- Arsyad, L. (2004). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan. *Edisi Keempat*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Arsyad, L. (2015). Ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 5(01), 1-37.
- Asy-Syatibi. (1997). *Al-Muwafakat fi ushul as-syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Bakri, A. J., & Umar, N. (2016). *Konsep maqashid syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Baujard, A. (2016). Welfare economics. In *Handbook on the History of Economic Analysis Volume III* (pp. 611-624). Edward Elgar Publishing.
- Bhakti, N. A., Istiqomah, I., & Suprpto, S. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia Periode 2008-2012. *Jurnal ekonomi dan keuangan*, 18(4), 452-469. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i4.97>
- Cendra, C., Fauzi, M., Arzam, A., Novia, A., Hulwati, H., Bustami, Y., ... & Mursal, M. (2021). The effect of income with household consumption on the welfare of dodol potato businesses assessed from Islamic economic concept. *Dinar Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(2), 81-93. <https://doi.org/10.21107/dinar.v7i2.11214>
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (Eds.). (2022). *World Inequality Report 2022*. Harvard University Press.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge* (No. 17). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. U., Khan, S., & Al Shaikh-Ali, A. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shari'ah*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

- Easterlin, R. A., & O'Connor, K. J. (2022). The easterlin paradox. In *Handbook of labor, human resources and population economics*. Cham: Springer International Publishing.
- El-Karanshaw, H. A., Omar, A., Khan, T., Ali, S. S., Izhar, H., Tariq, W., ... & Al Quradaghi, B. (2015). Islamic economics: Theory, policy and social justice. *Doha: Qatar Foundation*.
- Fahrudin, A. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Faturochman, F., & Dwiyanto, A. (2016). Validitas dan reliabilitas pengukuran keluarga sejahtera. *Populasi*, 9(1). <https://doi.org/10.22146/jp.11710>
- Fauzia, I. Y. & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif maqashid al-syariah*. Kencana.
- Fauzi, M., Asa'ari, A. A., Arzam, A., Mursal, M., Zufriani, Z., Novia, A., & Syarif, D. (2021). Welfare Beneficiary Community BUMDes Karya Dermawan Dusun Dalam Village. *International Journal of Social Science and Business*, 5(3), 319-325. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v5i3.38621>
- Fauzi, M., Arzam, A., Novia, A., & Hulwati, H. (2022). KESEJAHTERAAN EKONOMI ISLAM: Bukti Dari Masyarakat Penerima Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Dermawan Dusun Dalam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 375-409. <https://doi.org/10.21274/an.v9i2.5930>
- Hamid, M. A. (2007). *Hukum ekonomi Islam (ekonomi syariah) di Indonesia: aplikasi & prospektifnya*. Ghalia Indonesia.
- Khadduri, M. (1984). *The Islamic conception of justice*. JHU Press.
- Kucukaksoy, I. (2011). Adam Smith's conceptual contributions to international economics: Based on the Wealth of Nations. *Business and economic horizons*, (04), 108-119. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=244893>
- Krippendorff, K. (2009). *The content analysis reader*. sage.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 29-38.
- Luthfi, M & Ismail. (2018). *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Radjagrafindo Persada
- Maulana, R., & Bowo, P. A. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan teknologi terhadap ipm provinsi di indonesia 2007-2011. *Journal of Economics and Policy*, 6(2), 103-213.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
- Pressman, S. (2000). *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia (Fifty Major Economists)*. (T. W. B. Santoso, Penerj.). Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada
- Puspita, D. (2014). *Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal Dan Fuzzy K-Nearest Neighbor (Studi Kasus Kabupaten Temanggung Tahun 2013)* (Undergraduate thesis, FSM Universitas Diponegoro).
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. (Soeroyo et al, Penerj.). Jakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Rozalinda, M. A. (2017). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sari, N., Syarif, D., Fauzi, M., & Mursal, M. (2021). Pengaruh Harga Kayu Manis Terhadap Kesejahteraan Petani Ditinjau Dalam Aspek Religiusitas. *Jurnal*

- Iqtisaduna*, 7(2), 188-203. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v7i2.25648>
- Setiawan, M. A. (2013). Indeks pembangunan manusia Indonesia. *Jurnal Economia*.
- Siregar, N. R., Suryana, A. A. H., Rostika, R., & Nurhayati, A. (2017). analisis tingkat kesejahteraan nelayan buruh alat tangkap gill net di desa Sungai Buntu kecamatan Pedes kabupaten Karawang. *Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol. VIII No, 112*, 117.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2010). *Mismeasuring our lives: Why GDP doesn't add up*. The New Press.
- Sudarsono. (1982). *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: LP3ES.
- Sunarti, E. (2011). *Isu Strategi Dalam Analisis Dampak Kependudukan Sosial Ekonomi, Tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera*. (Tulisan disusun pada juli 2011 yang diselenggarakan oleh Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN).
- Tjokroaminoto, H. O. S. (2010). *Islam dan Sosialisme*. Bandung: Segi Arsy.